

RINGKASAN

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK (*CHILD LABOUR*) DENGAN FOKUS ANAK JALANAN DI SURABAYA

(THE EFFECTIVENESS OF POLICIES ON PROTECTION OF CHILD LABOUR WITH A FOCUS ON STREET CHILDREN IN SURABAYA)

(Sulikh Asmorowati)

Jurusan Ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Airlangga, Tahun 2005, 36 halaman

Penelitian ini berfokus pada kebijakan perlindungan anak jalanan di Surabaya. Fokus ini diambil karena dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan di Indonesia, termasuk di Kota Surabaya, berikut permasalahan-permasalahannya yang timbul di dalamnya cenderung meningkat. Ini mengindikasikan perlunya kebijakan penanganan maupun perlindungan anak jalanan yang komprehensif serta proses pengimplementasian yang efektif. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kualitas hidup dan masa depan anak-anak jalanan sangat memperhatikan, sementara mereka adalah aset, investasi SDM sekaligus tumpuan masa depan bangsa. Jika kondisi/kualitas hidup anak yang memprihatinkan ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin bangsa ini mengalami *lost generation* (generasi yang hilang), mengingat pentingnya peranan generasi muda bagi kelangsungan pembangunan dan kelangsungan bangsa kelak.

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan pekerja anak, khususnya berkenaan dengan anak jalanan di Kota Surabaya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan perlindungan/penanganan anak jalanan yang diimplementasikan di Kota Surabaya serta mengetahui bagaimana efektivitas implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambatnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti berupaya menggambarkan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan perlindungan pekerja anak, khususnya berkaitan dengan anak jalanan di Surabaya. Populasi penelitian ini adalah institusi pelaksana kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Surabaya. Informan penelitian ditarik secara *the Systematic Selection Procedur*, yaitu dengan menggunakan 'purposive sampling' atau informan bertujuan, yakni staf pada institusi terkait dengan anak jalanan yang dianggap memahami dan

terkait dengan permasalahan. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah staf-staf pada dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas pendidikan, serta beberapa staf dari LPA Jatim. Data dikumpulkan lewat wawancara secara langsung dengan pedoman wawancara bersifat terbuka. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif, dan disajikan baik dalam bentuk tabel frekuensi maupun uraian-uraian kualitatif dengan penyajian bentuk naratif untuk memperoleh gambaran sedetail mungkin untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya melibatkan beberapa instansi terkait yaitu, Dinas Sosial, Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Polisi Wilayah Kota Besar (Polwiltabes), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah sakit jiwa serta Kecamatan dan Kelurahan. Dalam implementasinya, tidak jarang institusi-institusi ini melibatkan stakeholder-stakeholder lain, diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (misalnya LPA, *Save the Children*), termasuk rumah singgah-rumah singgah atau institusi pendidikan seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga. Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua dinas yang seharusnya berperan memiliki program penanganan anak jalanan. Instansi yang mempunyai program khusus untuk menangani anak jalanan adalah hanya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sedang instansi lain hanya mendukung bahkan kurang aktif.

Sementara untuk kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya selama ini sudah berjalan, tetapi tidak dapat menjangkau semua anak jalanan di Surabaya (belum ada 1000 anak jalanan yang tertangani dari total 2.310 anak jalanan di Surabaya pada tahun 2003). Dari segi implementasinya, kebijakan maupun program tersebut masih belum efektif karena belum mampu mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam formulasi kebijakan. Ditambah dengan adanya realitas seperti program yang salah sasaran, karena tidak dilaksanakan secara khusus untuk anak jalanan; program tidak berkelanjutan serta kurang terkoordinasi dengan baik. Semua ini menyebabkan terjadinya kecenderungan peningkatan anak jalanan dari tahun ke tahun. Adapun, faktor pendukung dan penghambat kebijakan penanganan anak jalanan adalah belum tersedianya *data base* tentang anak jalanan yang akurat, yang memberikan informasi tentang jumlah, sebaran maupun daerah asal anak jalanan sehingga upaya penanganannya menjadi lebih komprehensif. Selain itu, meski telah ada perundangan yang terkait dengan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan dan kekerasan anak jalanan (dalam kerangka UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak), namun

penegakannya belum efektif, serta belum tersosialisasikan dengan baik. Kalaupun ditegakkan, penegak hukum tidak punya perspektif tentang hak anak. Serta belum ada Perda yang memihak pada hak-hak anak (Perda Perlindungan Anak), meski LSM-LSM sedang berupaya tampak belum ada respon yang menggembirakan dari Pemkot Surabaya. Dan terakhir, kebijakan penanganan anak jalanan masih belum didukung dengan sumber daya yang memadai, baik berupa fasilitas, sumber daya manusia maupun sumber pendanaan. Realitanya Pemkot belum cukup mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat undang-undang, hal ini menunjukkan dampak dari pembangunan yang belum memihak pada orang miskin (*pro poor development*).

Sebagai saran, agar implementasi kebijakan dan program penanganan anak jalanan di Kota Surabaya menjadi lebih efektif dan optimal, maka Pemkot Surabaya harus mulai mengagendakan formulasi perda perlindungan anak sebagai salah satu skala prioritas. Selain itu Pemkot Surabaya melalui instansi-instansi terkaitnya harus membuat program-program yang benar-benar dikhususkan untuk penanganan dan perlindungan anak jalanan yang didukung dengan pengalokasian sumber daya baik SDM, dana dan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk pelaksanaannya. Agar instansi-instansi terkait lebih intensif dalam melakukan operasi penertiban, pembinaan serta pemberdayaan terhadap anak jalanan, terutama dari segi ekonomi, pendidikan dan agamanya, yang diasumsikan merupakan basis utama dan model yang efektif untuk penanganan dan pemberdayaan anak jalanan. Upaya ini dapat dilakukan dengan koordinasi antar sektoral, serta kerjasama yang baik dengan LSM-LSM maupun intitusi pendidikan formal maupun informal. Perlu ditekankan pula bahwa pemberdayaan anak jalanan harus dilakukan bersama dengan pemberdayaan keluarga mereka. Hal ini penting mengingat masyarakat dan negara yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas tumbuh dan berkembang dari dan dalam lingkungan keluarga yang sehat, kuat, cerdas dan berkualitas. Dengan demikian, masalah anak termasuk anak jalanan perlu penanganan yang meliputi pula basis keluarga karena keluarga adalah penanggung jawab pertama/utama masa depan anak.

Dibiayai oleh : Dana DIPA Universitas Airlangga
 Nomor SK Rektor : 4683/JO3/PP/2005
 Tanggal : 4 Juli 2005

SUMMARY

THE EFFECTIVENESS OF POLICIES ON PROTECTION OF CHILD LABOUR WITH A FOCUS ON STREET CHILDREN IN SURABAYA

(EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK (*CHILD LABOUR*) DENGAN FOKUS ANAK JALANAN DI SURABAYA)

(Sulikah Asmorowati)

Jurusan Ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Tahun 2005, 36 halaman

This research concerns with policies on protection of street children in Surabaya. It is driven by the increasing number of street children in Surabaya, as so in Indonesia, year to year. This increase is soon followed by the related problems, which certainly need to be addressed by a comprehensive policies on protection of street children that require an effective policies implementation. This research is deemed necessary, considering the poor quality of street children's live and welfare, as well as their poor future living. Without full attention to the problem, it is undoubtedful that *lost generation* in Indonesia will occur as children are the important generation for a country's development.

This research aims to describe the effectiveness of policies on protection of street children in Surabaya. Specifically, it seeks to identify the city government of Surabaya's policies in tackling and protecting street children as well as to know their effectiveness and to identify supporting and impeding factors for the effective implementation.

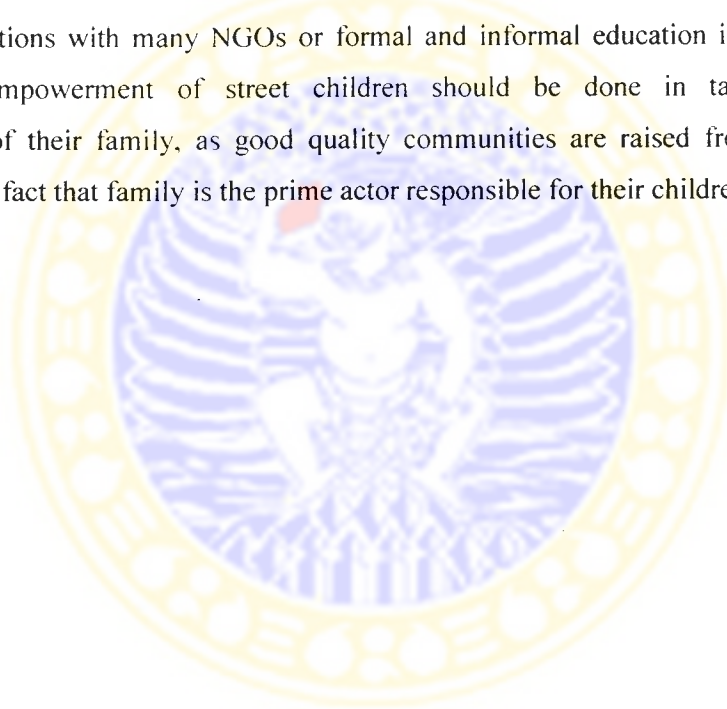
This research is descriptive in nature as the researcher seeks to describe how effective is the implementation of policies on street children in Surabaya. The population of this research is intitutions, i.e. those that implement and responsible for the policies. Informants are choose with *the Systematic Selection Procedur*, namely with 'purposive sampling' with the underlying assumption that informants are those who know exactly about the problems. The informants are staffs in Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, and some staffs of the Lembaga Perlindungan Anak (LPA Jatim). Datas are collected through interview as well as documentation of relevant secondary data and then analised qualitatively, presented both in the frequency tables and qualitative explanation of the problems to gain the conclusion.

This research finds that the implementing agencies of policies on protection of street children in Surabaya involve such institutions as Dinas Sosial, Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Polisi Wilayah Kota Besar (Polwiltabes), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah sakit jiwa and Kecamatan (*districts*) and Kelurahan (*wards*). In the implementation, these institution involve other stakeholders such as non government institusion (Lembaga Swadaya Masyarakat, for example LPA, *Save the Children*), also *rumah singgah-rumah singgah* (temporary shelter for street children) or institutions, such as Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga. Significantly, this reserach finds that not all institutions (Dinas) which suppose to actively involve, have roles in the initiatives on protecting street children. The only institutions which active and have special programs in tackling street children are Dinas Sosial, Dinas Kesehatan and Dinas Pendidikan, while other institutions only support or pasively involve.

In terms of the policies, it is found that the policies on street children in Surabaya are on going, however, it cannot cover all street children in Surabaya (in 2003 from a total of 2310 street children, the policies can cover less than 1000 street children). Meanwhile in the implementation contex, this research finds that the implementation of policies on street children in Surabaya has not been effective as they have not been able to achieve the policies' aims and targets. Moreover, there have not been policies that are designed spesifically for street children as well as the absence of good coordination amongst the institutions engage with the policies. Finally, the reserach finds supporting and impeding factors for the effective implementation of the policies, namely inavailability of an accurate *data base* on street childreen which inform the city government of Surabaya about the number and characteristics of the street children or where they come from so that the policy initiative can be more comprehensive. Besides, eventhough there has been law concern with the education, the health and the welfare of street children (UU no 23, 2002 tentang perlindungan anak (protection of child), the enforcement has been effective, and with poor internalisation/sosialisasi. If the law is enforced, the enforcement agencies have not had a perspetive on the child rights. Furthermore, there has not been any regional law (Perda) concerns with child rights (Perda Perlindungan Anak). Although there has been a demand from NGOs (LSM) for the city government to formulate such regional law (Perda Perlindungan Anak), the city government has not responded appropriately to the demand. Eventually, the policies on street children in Surabaya have not been supported with adequate

resources, in terms of facilities, finance or human resource. The reality is the city government has not allocated enough financial support as the laws order, showing the impact of development which is not pro poor.

As suggestions, to gain an effective implementation of the policies on protection of street children, the city government of Surabaya should put the formulation of regional law on child protection as a priority agenda. Besides, the city government through its relevant institutions should devote its attention to solve the problems related to street children by designing interventions or programs which are specifically targeted street children, supported by adequate resources (facilities, human resources and finance). These institutions should more actively involve in tackling, managing and empowering street children, especially in the economic, education and religious aspect as these constitute the primary base dan model for an effective protection of street children. These can be done with coordination amongst sectors as well as cooperations with many NGOs or formal and informal education institutions. Most significantly, empowerment of street children should be done in tandem with the empowerment of their family, as good quality communities are raised from good quality families and the fact that family is the prime actor responsible for their children future.



Funded by : Dana DIPA Universitas Airlangga
Number SK Rektor : 4683/JO3/PP/2005
Date : 4 Juli 2005